



Komisial Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : EUIS RIYANTI
NIK : 3273044902840002
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO
Jabatan : HAKIM
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 20 Februari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



NOMOR BUKTI PEMOTONGAN
25093UA2L

PERIODE PENGHASILAN
01-2025-12-2025

SIFAT PEMOTONGAN
TIDAK FINAL

STATUS BUKTI PEMOTONGAN
NORMAL

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1	NIK/NPWP	:	3273044902840002		
A.2	Nama	:	EUIS RIYANTI		
A.3	Alamat	:	JL. KOPO GG. PANINEUNGAN I RT. 002 RW. 003		
A.4	NIP/NRP	:	198402092008052001	A.7	Status PTKP : TK0
A.5	Jenis Kelamin	:	Wanita	A.8	Posisi : Hakim
A.6	Pangkat/Golongan	:	Pembina/ IVa	A.9	Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja : Tidak

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1	Kode Objek Pajak	:	21-100-01	B.1.2	Objek Pajak	:	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap
B.2	Jenis Pemotongan	:	Setahun Penuh				

I. PENGHASILAN BRUTO

1.	Gaji Pokok/Pensiun	58.989.000
2.	Tunjangan Istri	0
3.	Tunjangan Anak	0
4.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0
5.	Tunjangan Struktural / Fungsional	305.200.000
6.	Tunjangan Beras	1.013.880
7.	Tunjangan Lain-lain	16.200.880
8.	Penghasilan Tetap dan Teratur Lainnya yang Pembayaran Terpisah dari Pembayaran Gaji	0
9.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d. 8)	381.403.760

II. PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

10.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	6.000.000
11.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua	4.044.960
12.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja	0
13.	Jumlah Pengurangan (10 s.d. 12)	10.044.960

III. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

14.	Jumlah Penghasilan Neto (9 - 13)	371.358.800
15.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	0
16.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun / Disetahunkan)	371.358.800
17.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	54.000.000
18.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (16 - 17)	317.358.800
19.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan	48.339.500
20.	PPh Pasal 21 Terutang	48.339.500
21.	PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	0
22.	PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	48.339.500
23.	PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong	48.012.957
24.	PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (22 - 23)	326.543

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

C.1	NPWP	:	0001088939822000
C.2	NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi	:	0001088939822000000000 - PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO Badan Urusan Administrasi MAHKAMAH AGUNG
C.3	Nama Pemotong	:	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO Badan Urusan Administrasi MAHKAMAH AGUNG
C.4	Tanggal	:	21 Januari 2026
C.5	Nama Penandatanganan	:	DOZEN SAPUTRA
C.6	Pernyataan	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah.

